

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA MODAL**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Chika Angellia
No. Mahasiswa : 18312343

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA MODAL**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Chika Angellia

No. Mahasiswa: 18312343

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 09 Juni 2022

Penulis,



(Chika Angellia)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
BELANJA MODAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Chika Angellia

No. Mahasiswa: 18312343

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 09 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Siap diuji

(Arief Rahman, S.E., SIP., M.Com., Ph.D)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta para sahabat yang telah membawa agama islam hingga ke pengikutnya di akhir zaman.

Penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2017-2019) disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan cinta dan rahmat-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan

kepada hamba-Nya dalam menjalani segala urusan sebagai makhluk-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu dirindukan umatnya sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Semoga keteladanan beliau dalam menjadi pedoman bagi penulis untuk selalu memperbaiki diri dan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Bapak Heri Gunawan dan Ibu Titin Mawarni selaku orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan menjadi semangat bagi penulis dari masa kecil sehingga sekarang penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Bapak Arief Rahman, S.E., SIP., M.Com., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
6. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
7. Enrico Chiesa Siregar selaku sahabat terbaik sedari kecil bagi penulis. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta bantuan dalam keadaan apapun yang telah diberikan kepada penulis.

8. Amart Mikael, Aryana Faziroh, Aryani Fazirah, Alisha Maulidita selaku sahabat yang selalu ada bagi penulis. Terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Abel, Enrico, Laura, Ibam, Muti, Tasya (Keluarga Berencana) selaku sahabat masa SMA hinggalah sekarang. Terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Tri Desi N, Alya Fariha, Zanuba Zaneta, Nabila Dea, Agnes Damayanti selaku teman terdekat masa perkuliahan yang selalu ada untuk penulis. Terima kasih atas segala pengalaman berharga yang sangat berkesan yang sudah kita lalui selama hidup di jogja dan semoga silaturahmi kita selalu terjalin.
11. Tassa Amirah Sari, Silviska Wiranti selaku teman senasib seperantauan bagi penulis. Terima Kasih atas segala motivasi, dukungan, serta pengalaman berharga selama ini.
12. Yosi Eka Putri selaku teman terdekat dari SMA dan seperantauan bagi penulis. Terima Kasih telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Adinda Thalia Verdanda selaku sahabat terdekat penulis. Terima kasih karena telah memberikan banyak semangat dan motivasi untuk penulis disaat sedang tidak ada semangat dan lelah.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat oleh penulis masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan juga kritik sangat

diharapkan agar skripsi ini lebih sempurna hingga penelitian berikutnya.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga pihak-pihak
yang berkepentingan.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

Chika Angellia



DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Agensi	7
2.1.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	8
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Hipotesis Penelitian	21
2.3.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	21
2.3.2 Pengaruh DAU terhadap belanja modal	23
2.3.3 Pengaruh DAK terhadap belanja modal.	24
2.3.4 Pengaruh DBH terhadap belanja modal	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian	27
3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel	27
3.2.1 Variabel Independen	27
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
3.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	28
3.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	28
3.2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)	29
3.2.2 Variabel Dependen	29

	10	
3.3	Metode Pengumpulan Data	30
3.4	Metode Analisis Data	30
3.4.1	Statistik Deskriptif	30
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	30
3.4.3	Analisis Regresi Berganda	32
3.4.4	Koefisien Determinasi	32
3.4.5	Uji Hipotesis	33
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	34
4.2	Uji Asumsi Klasik	37
4.2.1	Uji Normalitas	37
4.2.2	Uji Multikolinearitas	38
4.2.3	Uji Heteroskedastisitas	39
4.2.4	Uji Autokorelasi	40
4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	41
4.3.1	Uji Koefisien Determinasi	43
4.4	Uji Hipotesis	44
4.5	Pembahasan	45
4.5.1	Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	45
4.5.2	Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	46
4.5.3	Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal	47
4.5.4	Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		50
5.1	KESIMPULAN	50
5.2	SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN		54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	34
Tabel 4.2 Tabel Uji Normalitas	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	41
Tabel 4.4 Analisis Regresi Berganda	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

40



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi tahun 2017-2019 dengan sampel berjumlah 102. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Tidak terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures. This study uses a population of all provinces in Indonesia, totaling 34 provinces in 2017-2019 with a sample of 102. The data used is secondary data with the analytical method using multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that there is a positive influence between Regional Original Income, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Capital Expenditures. There is no influence between the General Allocation Fund on Capital Expenditures.

Keyword: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sudah melakukan reformasi pemerintahan daerah dengan memberlakukan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 1999. Berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya undang-undang tersebut setiap pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk membuktikan kemampuan tiap daerahnya. Untuk memenuhi segala kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan inovasi baru untuk menggali sumber-sumber keuangan di tiap-tiap daerahnya karena pemerintah daerah berbanding dengan pemerintah pusat dianggap lebih tahu mengenai kondisi serta kebutuhan yang diperlukan oleh daerahnya sendiri.

Suatu daerah dikatakan daerah otonom dan mampu berotonomi terletak pada bagaimana daerah tersebut mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan melakukan strategi pada alokasi belanja daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Proporsi anggaran belanja modal harus lebih ditingkatkan untuk mengembangkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah karena belanja modal merupakan faktor penting untuk meningkatkan perekonomian serta memiliki manfaat jangka panjang dan memberikan manfaat kepada publik. Pemerintah daerah juga seharusnya mengimplementasikan menerapkan salah satu

landasan yaitu kemandirian guna meningkatkan penerimaan daerah melalui pengoptimalisasi pendapatan dari aspek PAD yang komponen penyumbang terbesar yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaannya kebijakan otonomi daerah juga didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah yaitu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dari perimbangan keuangan tersebut kemudian diwujudkan dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pengalokasiannya dipergunakan dalam rangka mengakomodasi keperluan di tiap daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Untuk beberapa wilayah daerah yang sumber Pendapatan Asli daerah yang relatif rendah akan bergantung pada dana perimbangan.

Dana alokasi umum dialokasikan dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah untuk membiayai daerah dengan tujuan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan daerah yang penting bagi prioritas nasional, seperti mendanai proyek sarana dan prasarana pelayanan publik untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan yang di dalamnya terdapat Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan belanja daerah.

Belanja modal sebagai bentuk dari pengeluaran biaya pada perolehan aset berupa aset tetap dan lainnya serta memiliki benefit lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2012). Menurut Kementerian Keuangan RI, anggaran Belanja modal yaitu pengeluaran biaya yang pemanfaatannya guna memperoleh serta meningkatkan aset tetap dan lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi dan batas terendah kapitalisasi aset yang telah diterapkan pemerintah. Belanja modal merupakan kunci utama bagi suatu badan atau instansi yang ingin membeli serta memperoleh aset tetap. Tidak hanya itu Belanja Modal juga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan manfaat yang ada yaitu setelah adanya pengeluaran satu tahun anggaran atau lebih.

Belanja daerah di Indonesia rata-rata digunakan atau dialokasikan untuk belanja pegawai saja dibandingkan belanja modal padahal belanja modal bisa meningkatkan perekonomian dan manfaat kepada publik. Peningkatan belanja modal juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mampu memberikan keuntungan yang nantinya dapat digunakan sebagai penerimaan Kembali bagi pemerintah daerah. Maka dari itu setiap pemerintah daerah seharusnya bisa lebih mengoptimalkan belanja modal dibandingkan belanja lainnya.

Acuan utama penelitian ini adalah penelitian (Sudika & Budiarta, 2017) yang meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi Bali. Hasil membuktikan bahwasanya secara parsial DAU dan DAK memiliki pengaruh positif kepada belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan

adanya penambahan variabel independen yaitu PAD dan DBH serta obyek penelitian yang berbeda.

Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Maka dari itu, penulis akan mengerjakan penelitian berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian yang diteliti bertujuan guna mengindikasikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Manfaat Teoritis

Hasil pada penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan teori tentang akuntansi sektor publik dan memberikan referensi untuk diskusi topik terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat sebagai landasan informasi terhadap urgensi perencanaan pembangunan terkhusus di bidang pengalokasian belanja modal.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini menerangkan teori-teori terkait penelitian, variabel penelitian yang akan digunakan, hasil dari penelitian terdahulu, dan penentuan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

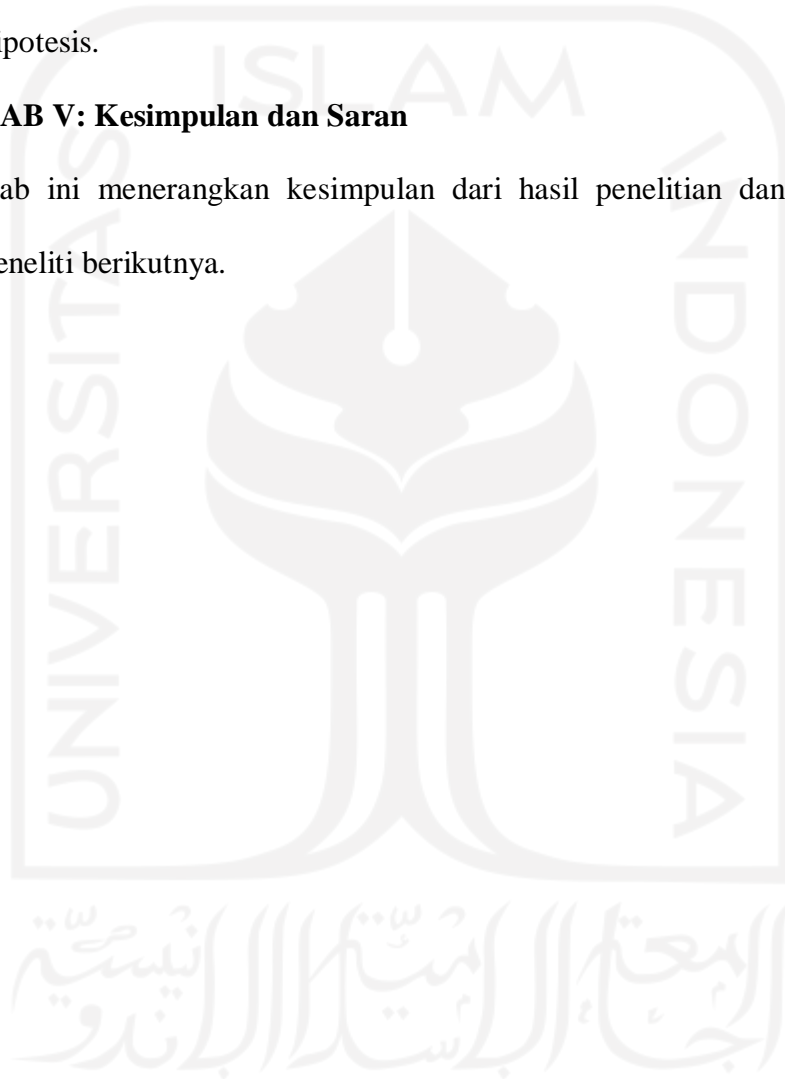
Bab ini menerangkan metode penelitian yang berisi populasi penelitian, sumber data, metode pengambilan data, dan alat uji yang akan digunakan.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab ini menerangkan hasil penelitian, dan analisis data terkait pengujian hipotesis.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menerangkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk peneliti berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menguraikan tentang teori masalah relasi keagenan antara *principal* dan *agen*. Prinsipal selaku pemberi wewenang dan agen selaku pihak yang menerima wewenang dalam bentuk kerja sama. (Abdullah & Halim, 2006) menjelaskan bahwa teori keagenan didasarkan pada hubungan antara prinsipal dan agen, yang berasal dari beberapa teori yang berbeda seperti teori ekonomi, sosiologis, keputusan, dan organisasi. Ditinjau dari perspektif pemerintah daerah, Keagenan dapat terjadi antara eksekutif dan legislatif, serta publik. Eksekutif yaitu kepala daerah sebagai agen bekerja sama dengan legislatif yaitu DPRD sebagai prinsipal. Legislatif sebagai sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal terjadi karena masyarakat memilih DPRD sebagai wakil rakyat dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah alokasi belanja daerah yang di dalamnya terdapat belanja modal.

Teori agensi dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu hubungan antara pihak eksekutif yaitu pemerintah selaku agen dan pihak legislatif selaku prinsipal dalam penyusunan APBD. Eksekutif selaku pihak yang melaksanakan urusan pemerintahan termasuk penyusunan APBD setiap tahunnya berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang kemudian memberikan informasi kepada pihak legislatif terkait rancangan yang akan

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan masyarakat termasuk Belanja Modal. Pihak legislatif kemudian mengkaji dan memeriksa kembali rancangan tersebut dan setelah itu dibuat menjadi Perda (Peraturan Daerah). Setelah DPRD menyetujui dan mengesahkan perda termasuk Anggaran APBD yang kemudian Anggaran APBD tersebut akan dijadikan pihak legislatif sebagai kontrol dalam mengawasi kinerja pemerintah.

2.1.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Berdasarkan permendagri Nomor 21 tahun 2011 Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke berbagai sektor di daerah. Anggaran tersebut dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD juga merupakan bagian dari instrumen kebijakan yang digunakan untuk alat dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum di suatu daerah. Anggaran digunakan untuk mengkaji tindakan sebelumnya, mengarahkan kegiatan fiskal pemerintah dan untuk di masa yang akan datang agar dapat memahami berbagai program pemerintah. Dalam upaya efektivitas pemerintah daerah dan pengembangan kapabilitas, anggaran daerah berada sebagai posisi sentral.

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Halim (2008) APBD merupakan suatu anggaran daerah di mana terdapat aspek-aspek sebagai berikut:

1. Terdapat rencana kegiatan dari daerah berikut uraian detailnya.
2. Terdapat sumber penerimaan sebagai target minimal untuk menaungi anggaran yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Terdapat anggaran sebagai batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dimasukkan dalam angka periode anggaran yang umumnya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 dikemukakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan berskala *annual* dari pemerintahan daerah yang diputuskan sesuai peraturan daerah. Sedangkan, berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 dinyatakan bahwasanya APBD adalah rencana keuangan bersifat *annual* dari Pemerintahan Daerah kemudian dibahas serta disepakati secara bersamaan oleh Pemerintah Daerah sekaligus DPRD, setelahnya diputuskan melalui Peraturan Daerah.

1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan pemerintah daerah yang memiliki benefit lebih dari satu periode anggaran guna menambah kekayaan dari daerah yang kemudian menaikkan belanja yang sifatnya sudah pasti dilakukan seperti pembiayaan pemeliharaan pada belanja administrasi umum.

Belanja Modal dapat dikategorikan Belanja Langsung yang kemudian dipergunakan guna pembiayaan bersifat pengeluaran dan juga digunakan untuk aset tetap berwujud yang bermanfaat lebih dari 1 tahun untuk kegiatan pemerintahan. (Permendagri No. 13 tahun 2006)

Saat meningkatkan investasi modal pemerintah daerah diharapkan dapat menaikkan kualitas terhadap pelayanan publik yang diharapkan pula bisa meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan di suatu daerah. Dengan adanya peningkatan belanja modal maka berdampak pula pada periode selanjutnya yaitu masyarakat akan lebih produktif dan investor juga akan bertambah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber pendapatan yang berasal dari daerah bersangkutan. Pendapatan asli daerah tersebut diperoleh dengan ketentuan yang berpedoman kepada perpu yang berlaku. Halim and Nasir (2006) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah dan diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak, retribusi, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Berdasarkan pendapat di atas maka pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dengan

ketentuan perundang-undangan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang digunakan untuk menyelenggarakan roda pemerintah serta pemberian pelayanan untuk masyarakat. Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah yang tujuannya untuk menurunkan kesenjangan dalam laju pertumbuhan antar tiap daerah serta pelayanan antar bidang dan untuk menaikkan ketersediaan sarana serta prasarana fisik daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (Sukarna, Subekan, & Rengga, 2012).

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah DAK memiliki peran penting karena sinkron terhadap prinsip desentralisasi akuntabilitas dan tanggung jawab bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat yang sudah dialihkan ke pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 32/2004 dan Undang-undang Nomor 33/2004, daerah yang memperoleh Dana Alokasi Khusus mempersiapkan dana penyesuaian yang dianggarkan ke APBD sejumlah minimal 10% dari DAK. Namun, daerah yang mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang mereka dapatkan tidak harus mempersiapkan dana penyesuaian. Tidak seluruh daerah mendapatkan DAK karena DAK dimaksudkan guna memperbaiki kondisi infrastruktur fisik.

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang sumbernya didapatkan melalui dana APBN yang pengalokasiannya bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar sehingga bisa mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Pembagian dana alokasi umum cenderung memiliki ketimpangan antar tiap daerah karena dibagi berdasarkan bagi hasil berdasarkan daerah penghasil dan juga pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Kebutuhan fiskal tiap daerah juga memengaruhi seberapa besar pengalokasian dana alokasi umum ini sendiri. Daerah yang potensi fiskalnya cukup besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapatkan dana alokasi umum lebih kecil dan begitupun sebaliknya. Tujuannya agar APBD memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan masing-masing daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang tercermin dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai. (Halim, 2002).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2002), ketimpangan ekonomi antar provinsi di Indonesia tak bisa dihindari meskipun terdapat desentralisasi fiskal. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemerintah daerah kurang menggali sumber daya alam yang ada serta minimnya sumber pajak di daerah tersebut. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat berinisiatif memberikan subsidi kepada tiap daerah berupa dana alokasi umum. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif kian tinggi akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang kian tinggi juga dibandingkan daerah yang lebih kaya dan juga sebaliknya. DAU akan memberikan jaminan kepada tiap daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan guna mendukung keperluan penggunaan sebagai kewajiban tiap daerah.

5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang sumbernya bersumber pada pendapatan APBN kemudian dialokasikan pada tiap daerah menurut angka persentase guna mendanai keperluan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil yang diberikan pada pemerintah daerah memiliki 2 tipe, meliputi DBH pajak serta bukan pajak. Besarnya pendapatan belanja yang diperoleh daerah sangat erat kaitannya dengan tingkat pembayaran sebagai basis pajak. Oleh karena itu, daerah dengan tingkat gaji yang lebih tinggi akan lebih sering mendapatkan DBH pajak yang lebih tinggi (Wahyuni & Adi, 2009).

Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup memiliki potensial dan merupakan bagian dari modal dasar pemerintah daerah untuk memenuhi belanja daerah dan mendapatkan dana pembangunan yang tidak bersumber dari PAD. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilaksanakan berdasarkan persentase spesifik diacukan pada daerah penghasil. DBH pajak yang diterima berasal dari: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). Adapun, DBH SDA yang diterima bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Riset terkait pengalokasian belanja modal sudah banyak diteliti. Sudika and Budiarta (2017) dengan dilakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal di Provinsi Bali yang mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota pada periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda dan menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif signifikan pada belanja modal, Adapun retribusi daerah tidak memiliki pengaruh kepada belanja modal. Dengan ini mengindikasikan

masih terdapat dependensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terhadap dana transfer.

Hairiyah, Malisan, and Fakhroni (2017) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh DAU, DAK, dan PAD kepada belanja modal. Riset penelitian mengindikasikan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan tetapi negatif kepada belanja modal, PAD dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Ferdiansyah, Deviyanti, and Pattisahusiwa (2018) mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK dan Dana perimbangan kepada Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun dengan menggunakan data laporan anggaran tahun 2011-2016. Variabel bebas yang digunakan berupa PAD, DAU, dan DAK, serta dana perimbangan. Adapun, variabel terikat yang digunakan berupa belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan variabel DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan variabel lainnya yaitu PAD dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan kepada belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2016.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Waskito, Zuhrotun, and Rusherlisyani (2019) dengan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH sebagai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan variabel DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Sulistyaningsih and Haryanto (2019) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus kepada alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan atau penurunan dari PAD, DAU, dan DAK secara stimulant akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan pada belanja modal.

Beberapa penelitian untuk variabel dependen belanja modal masih terdapat inkonsistensi dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kembali mengenai aspek-aspek yang memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Variabel Terkait	Metode Penelitian	Temuan Kajian
Sudikha dan Budiarta (2017)	Variabel dependen	Penelitian ini menggunakan	Variabel pajak daerah, dana

	menggunakan Belanja modal dan variabel independen menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus	sebanyak 46 sampel yang diambil menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dengan kriteria pengambilan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi APBD periode 2010-2014	DAU dan dana DAK memiliki pengaruh positif signifikan pada belanja modal, Adapun retribusi daerah tidak memiliki pengaruh pada belanja modal.
Hairiyah, Malisan, dan Fakhroni (2017)	Variabel independen di dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah. Variabel dependen Belanja Modal	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari BPS Kalimantan Timur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh

			signifikan positif terhadap belanja modal.
Ferdiansyah, Deviyanti dan Pattisahusiwa (2018)	Variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah belanja daerah	Populasi dalam penelitian ini adalah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam penarikan sampel.	Berdasarkan hasil penelitian variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan variabel lainnya yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani (2019)	Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Penelitian ini menggunakan kabupaten dan kota di provinsi Aceh periode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi,

	<p>pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal.</p>	<p>2015-2017 sebagai objek penelitian yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik sampling jenuh sebagai teknik pengambilan sampel.</p>	<p>pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.</p>
<p>Sulistyaningsih dan Haryanto (2019)</p>	<p>Variabel independen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus serta belanja modal sebagai variabel dependen.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2013-2017. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 sampel yang merupakan seluruh Kabupaten dan kota di Jawa Tengah.</p>	<p>Dari analisis data yang sudah dilakukan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.</p>

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang digunakan oleh pemerintahan daerah untuk menciptakan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan dan lainnya PAD yang sah yaitu sumber pendapatan PAD. Setiap pemerintah daerah selaku agen atau pihak yang menerima wewenang dituntut oleh pemerintah pusat selaku prinsipal atau pihak yang memberi wewenang untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan PAD di setiap daerahnya masing-masing dan digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur atau sarana prasarana daerah tersebut dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan pengalokasian belanja modal dalam APBD. Dengan PAD yang semakin bagus di satu daerah, maka kian tinggi juga alokasi belanja modal nya (Ardhani, 2011).

Kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan otonomi daerah. Dengan kian besar PAD yang diperoleh daerah, maka kian besar juga kekuatan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan otonomi. Dengan melaksanakan otonomi daerah dapat menggarap pemerintahan yang lebih terbuka dan memajukan wilayah ekonomi. Alokasi

belanja untuk keperluan investasi melalui belanja modal dapat dilakukan demi meningkatkan pelayanan publik (Ardhani, 2011).

Variabel PAD berpengaruh kepada belanja modal karena kian besar PAD didapatkan oleh daerah sehingga kian longgar pula alokasi belanja modalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih and Haryanto (2019) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara PAD dengan belanja modal, (Nopitasari, 2017) juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan belanja modal serta (Aditya & Dirgantari, 2017) mengatakan bahwasanya PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Maka dari itu, hipotesis pada penelitian ini seperti berikut

H1: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.3.2 Pengaruh DAU terhadap belanja modal

Dana alokasi umum (DAU) dapat menunjukkan seberapa tingkat kemandirian suatu daerah dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi suatu daerah untuk memenuhi belanja daerah tersebut. Daerah yang menerima semakin banyak DAU dari pemerintah pusat menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan masih bergantung terhadap pemerintah pusat dan juga sebaliknya (Kusnandar & Siswantoro, 2012).

Dana alokasi umum dialokasikan dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah untuk membiayai daerah dengan tujuan desentralisasi. Maka dari itu pemerintah

pusat (*prinsipal*) memberi alokasi finansial dari pusat ke pemerintah daerah (*agen*) termasuk dana alokasi umum yang diharapkan bisa meratakan finansial di setiap daerah. Dana alokasi umum yang merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah termasuk belanja modal yang merupakan komponen dari belanja daerah.

Berdasarkan penelitian dari Sudika and Budiarta (2017) DAU memiliki pengaruh kepada belanja modal. (Ardhani, 2011) juga mengindikasikan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan kepada alokasi belanja modal. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa perilaku dalam belanja daerah khususnya belanja modal sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.3.3 Pengaruh DAK terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan dari Pemerintah Pusat selaku (*prinsipal*) pemberi wewenang ke pemerintah daerah selaku (*agen*) atau pihak yang diberi wewenang yang tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan sarana serta prasarana fisik tiap daerah yang sesuai dengan prioritas nasional dan menurunkan kesenjangan pada laju pertumbuhan tiap daerah serta pelayanan

tiap bidang (Sukarna et al., 2012). Dana Alokasi Khusus berperan penting dalam dinamika pembangunan pada sarana prasarana pelayanan dasar di suatu wilayah karena sepadan terhadap prinsip desentralisasi yaitu tanggung jawab serta akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat yang dialihkan ke pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

DAK adalah salah satu dana yang sumbernya dari dana APBN yang kemudian dibagikan ke tiap daerah khusus yang tujuannya untuk membantu pendanaan suatu kegiatan yang bersifat khusus atau urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penggunaan fungsi DAK, dikoordinasikan untuk kegiatan khusus seperti perolehan, peningkatan, pengadaan, pembangunan serta perbaikan sarpras fisik yang berumur ekonomis yang panjang. Dari pengalokasian DAK diniatkan bisa berpengaruh terhadap belanja modal, sebab nilai DAK umumnya akan meningkat aset tetap guna memperbaiki pelayanan publik (Permatasari & Mildawati, 2016). Melalui penetapan DAK diharapkan dapat menurunkan beban biaya kegiatan khusus yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Wandira (2013) menemukan bahwasanya DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari itu, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal

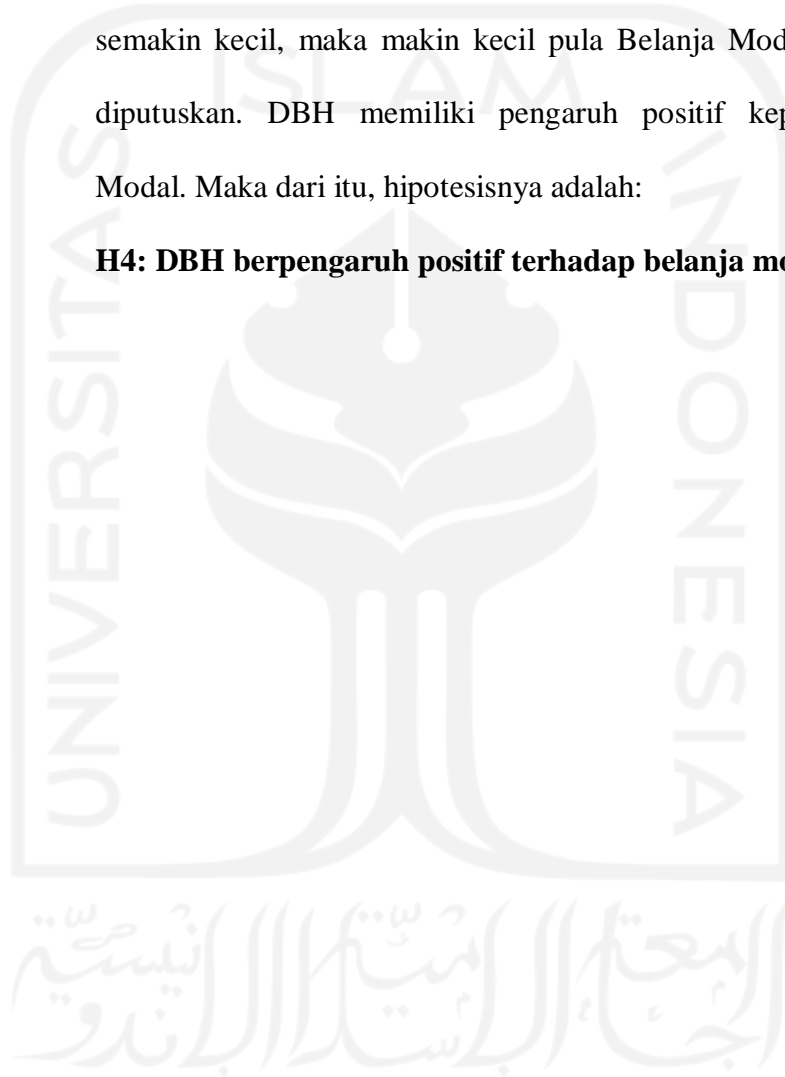
2.3.4 Pengaruh DBH terhadap belanja modal

Dana Bagi Hasil adalah dana yang sumbernya berasal dari dana APBN kemudian dialokasikan pada tiap daerah menurut persentase angka guna membantu memenuhi keperluan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai (*prinsipal*) atau pihak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah (*agen*) selaku pihak yang diberi wewenang terdiri atas dua macam, meliputi DBH pajak dan bukan pajak (SDA). Menurut Undang-Undang PPh terkini (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000), Daerah mendapatkan DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Telah ditetapkan PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil ditujukan sebagai kompensasi dan penyelemat bagi daerah yang tidak memiliki SDA tetapi telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume yang diperoleh dari pajak di tiap daerah berasosiasi kuat dengan besarnya jumlah pendapatan sebagai basis pajak, oleh karena itu daerah yang tingkat pendapatannya lebih tinggi cenderung memperoleh DBH pajak yang tinggi pula (Wahyuni & Adi, 2009).

Dana Bagi Hasil berasal dari pendapatan daerah dianggap memiliki potensi dan menjadi acuan dasar bagi setiap pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan serta juga memenuhi

belanja daerah yang bukan dari PAD selain DAU dan DAK. Berdasarkan teori jika DBH yang dianggarkan semakin besar, maka Belanja Modal ditetapkan pemerintah daerah cenderung lebih besar, begitu pun sebaliknya jika DBH yang dianggarkan semakin kecil, maka makin kecil pula Belanja Modal yang akan diputuskan. DBH memiliki pengaruh positif kepada Belanja Modal. Maka dari itu, hipotesisnya adalah:

H4: DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini merupakan Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia, terdiri atas 34 Provinsi dan data yang digunakan bersumber dari tahun 2017-2019. Dari populasi tersebut sampel akan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel yaitu:

Provinsi di seluruh Indonesia yang memublikasikan laporan APBD yang terdiri dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan realisasi Belanja Modal dalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah suatu objek yang akan diukur dalam penelitian. Variabel terdiri dari 2 yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Variabel bebas (*independen*) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Sedangkan variabel terikat (*dependen*) yang dipilih yaitu belanja modal.

3.2.1 Variabel Independen

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan pemerintah di provinsi seluruh indonesia dari tahun 2017-2019 terdiri atas hasil pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan, serta pendapatan daerah sah yang lain. Pengukuran

PAD dapat diukur dengan skala rasio. Penelitian ini menggunakan *natural log* (Ln) untuk mengurangi fluktuasi data. Dengan menggunakan *natural log*, nilai PAD yang sangat besar, miliar hingga triliun akan disederhanakan dengan tidak mengubah proporsi dari nilai asalnya.

$$PAD = Ln (PAD)$$

3.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan dana yang sumbernya dan dialokasikan dari dana APBN guna pemerataan kapabilitas antarwilayah untuk membiayai pengeluaran keperluan tiap daerah untuk desentralisasi. Nilai DAU yang berjumlah miliaran akan disederhanakan menggunakan *natural log* dengan tidak mengganti proporsi dari nilai asalnya.

$$DAU = Ln (DAU)$$

3.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana khusus yang dialokasikan dari APBN untuk daerah khusus yang penggunaannya untuk mendanai berbagai keperluan khusus daerah dan juga sesuai dengan prioritas nasional. *Natural log* digunakan pada penelitian adalah guna mengurai fluktuasi pada data. Nilai DAK berjumlah miliar tersebut disederhanakan dengan tidak mengubah proporsi nilai asalnya.

$$DAK = Ln (DAK)$$

3.2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana yang sumbernya berasal dari dana APBN yang kemudian dialokasikan ke setiap pemerintah provinsi seluruh Indonesia berdasarkan persentase angka yang kemudian digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Adapun parameter DBH sebagai berikut:

1. DBH Pajak
2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Variabel DBH dapat dihitung menggunakan skala perbandingan dengan perhitungan: DBH = Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak.

Dengan penggunaan *natural log* pada penelitian adalah untuk mengurangi adanya fluktuasi data. Nilai DAK yang jumlahnya mencapai miliaran tersebut disederhanakan dengan tidak mengubah proporsi dari nilai asalnya.

$$DBH = Ln (DBH)$$

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan meliputi variabel belanja modal. Belanja modal dapat dihitung melalui jumlah belanja modal pada laporan realisasi APBD pemerintah Provinsi se-Indonesia. Nilai belanja modal yang jumlahnya mencapai miliar hingga triliun akan

disederhanakan menggunakan *natural log* (Ln) untuk mengurangi adanya fluktuasi data tanpa mengganti proporsi dari nilai asalnya.

$$\text{Belanja Modal} = Ln (\text{Belanja Modal})$$

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang tidak bersumber dari peneliti langsung melainkan data dari sumber yang sudah ada melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia atau www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan hanya sebatas menyampaikan informasi saja tanpa adanya kesimpulan dari uji yang sudah dilakukan. Alat yang digunakan untuk analisis dalam uji deskriptif ini adalah rata-rata, maksimal dan minimal, standar deviasi yang kemudian digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Untuk yang memiliki data dengan jumlah banyak untuk melihat kesesuaian antara model persamaan regresi perlu dilakukan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa tahap uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2006).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya untuk menguji apakah pada penyebaran data baik variabel dependen maupun independen berdistribusi normal ataupun tidak. Uji tersebut berupa uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Adapun syarat yang dapat memenuhi uji normalitas diterima adalah nilai (K-S) memiliki angka probabilitas di atas $\alpha = 5\%$.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi di mana terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antar variabel bebas tersebut. Untuk melihat apakah terdapat multikolinearitas bisa dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji guna melihat di dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan antar *variance error* atau tidak. Hal ini terjadi apabila pada saat penyebaran titik data populasi tidak konstan. Model regresi yang digunakan merupakan model regresi homoskedastisitas di mana terdapat kesamaan antara *variance*. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat

menggunakan uji *glejser* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Jika pengujian tersebut memiliki hasil lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ditujukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Suatu observasi yang memakai data time series penyimpangan asumsi ini biasanya terjadi. Uji autokorelasi bisa dilakukan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test).

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda untuk analisis data dikarenakan Analisis regresi berganda menghitung antar dua variabel bebas atau lebih dan satu variabel terikat yang sesuai dengan penelitian ini.

3.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk penilaian kemampuan model regresi variabel independen (bebas) dalam menerangkan variabel dependen (terikat). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Nilainya berkisar antara nol sampai satu. Nilai yang semakin

mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir seluruh informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis akan menggunakan uji parsial (Uji t). Uji parsial digunakan untuk mengukur pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi dalam uji parsial ini (Uji t) adalah $\alpha = 5\%$. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan hanya sebatas menyampaikan informasi saja tanpa adanya kesimpulan dari uji yang sudah dilakukan dengan melihat standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, dan nilai rata-rata. Dari populasi 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2019 semuanya memenuhi kriteria sehingga dalam penelitian ini terdapat 102 sampel yang telah di uji. Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PAD	102	11,183	15,335	12,94337	1,115596
DAU	102	0,000	15,201	13,86682	2,453992
DAK	102	11,615	16,120	13,94481	0,884751
DBH	102	8,966	16,640	12,62232	1,479172
BELANJA MODAL	102	11,752	14,520	13,09997	0,740096
	102				

Sumber: Output SPSS diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.1, nilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal yang semulanya berjumlah miliaran telah diubah dalam bentuk natural log tanpa mengubah proporsi nilai aslinya.

1. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Belanja modal adalah salah satu komponen dalam belanja daerah yang

memiliki manfaat anggaran satu tahun yang akan menambah aset atau kekayaan pada suatu daerah. Hasil dari analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum dan maksimum pada variabel belanja modal yaitu sebesar 11,752 dan 14,520. Nilai minimum belanja dimiliki oleh Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 11,752 atau Rp1.270,25 Miliar dan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 14,520 atau Rp 21.119,93 Miliar Nilai rata-rata belanja modal Provinsi di Indonesia adalah sebesar 13,09997 atau sebesar Rp6.216,42 Miliar.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan variabel independen dalam penelitian ini. PAD merupakan sumber penerimaan terbesar yang dimiliki oleh suatu daerah dengan jangka waktu yang panjang dan berpengaruh besar terhadap penerimaan suatu daerah, Hasil dari analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum dan maksimum pada variabel PAD yaitu sebesar 11,183 dan 15,355. Nilai minimum dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 11,183 atau Rp718.910 Miliar dan nilai maksimum dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 15,335 atau Rp45.707.400 Miliar. Nilai rata-rata PAD pada seluruh Provinsi di Indonesia adalah sebesar 12,94337 atau Rp 824.180 Miliar.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan variabel independen dalam penelitian ini. DAU merupakan dana yang dialokasikan dari dana APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan antar tiap daerah untuk membiayai

daerah itu sendiri dengan tujuan desentralisasi. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum dan maksimum pada variabel DAU adalah sebesar 0,000 dan 15,201. Provinsi DKI Jakarta menempati nilai minimum yaitu sebesar Rp 0 karena DKI Jakarta merupakan satu-satunya Provinsi yang tidak memiliki dana alokasi umum sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp3,99843 Miliar. Nilai rata-rata DAU adalah sebesar 13,86682 atau Rp1,676608 Miliar.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. DAK merupakan salah satu dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk membantu kegiatan yang bersifat khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Dari analisis deskriptif yang sudah dilakukan menunjukkan nilai minimum dan maksimum pada variabel DAK adalah sebesar 11,615 dan 16,120. Nilai minimum DAK dimiliki oleh Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 11,615 atau senilai Rp 110.698.000. Nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 16,120 atau senilai Rp 10.018.939.000. Nilai rata-rata DAK seluruh Provinsi di Indonesia adalah sebesar 13,94481 atau senilai Rp1.737.892.000.

5. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini. DBH meliputi dana bersumber pada pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di mana didistribusikan pada daerah sesuai persentase guna memenuhi keperluan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil nilai minimum dan maksimum pada variabel DBH adalah sebesar 8,966 dan 16,640. Nilai minimum dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 8,966 atau senilai Rp12.834.000 sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 16,640 atau senilai Rp16.847.488.000. Nilai rata-rata DBH Provinsi di Indonesia adalah senilai 12,62232 atau senilai Rp1.000.828.000.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa tahap uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan guna mengindikasikan pada model regresi apakah memiliki hubungan yang bersifat signifikan dan representatif sehingga wajib dilakukan uji asumsi klasik.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat suatu model regresi yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen ataupun kedua variabel tersebut memiliki distribusi data yang normal ataupun tidak melalui uji *Kolmogorov-Smirnov*. Adapun syarat yang dapat memenuhi uji normalitas diterima atau data dikatakan normal adalah nilai memiliki angka probabilitas di atas α

= 5%. Jika nilai α lebih kecil dari 5% maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tabel Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,32748573
Most Extreme Differences	Absolute	0,093
	Positive	0,088
	Negative	-0,093
Kolmogorov-Smirnov Z		0,938
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,342

Sumber: Output SPSS diolah 2022

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,938 lebih besar dari syarat $\alpha = 5\%$. Sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat korelasi tiap variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dapat ditinjau dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Suatu model regresi

dikatakan tidak terdapat multikolinearitas adalah jika nilai $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,10$. Berikut adalah tabel dari hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
PAD	0,261	3.829
DAU	0,776	1.288
DAK	0,355	2.814
DBH	0,520	1.922

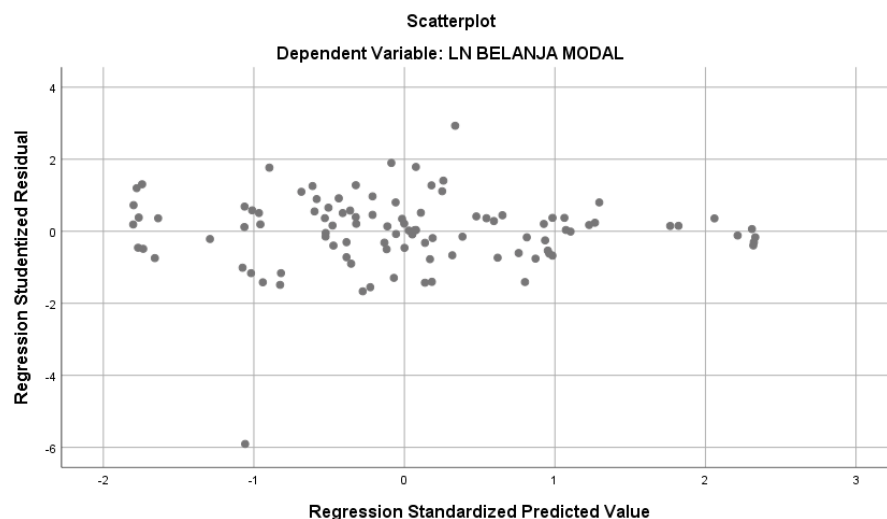
Sumber: Output SPSS diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.3 nilai VIF dari seluruh variabel independen lebih kecil atau kurang dari 10. Pada tabel 4.3 juga terdapat nilai tolerance dari seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10. Sehingga berdasarkan nilai VIF dan Tolerance dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah di dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan antar variance *error*. Analisis yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah diagram

scatterplot. Berikut adalah diagram *scatterplot* dari hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS diolah 2022

Dalam gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data-data dalam model regresi penelitian ini memiliki pola penyebaran data yang menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini merupakan data yang valid dan tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan pada data *time series* karena biasanya terdapat

penyimpangan asumsi yang dilakukan. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,851 ^a	0,724	0,713	0,396698	1,900

Sumber: Output SPSS 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hasil dari nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1.900. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan perbandingan nilai dl dan du dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan nilai $n=102$ dan $k=4$. Dari standar tersebut menghasilkan nilai yang didapat dari tabel durbin Watson yaitu sebesar $dl = 1.5969$ dan $du = 1.77596$. Nilai dari Durbin-Watson yang telah dilakukan yaitu sebesar 1.900 berada di antara nilai du sebesar 1.77596 dan $4-du$ sebesar $4-1.77596 = 2.22404$ sehingga disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan tahap uji yang diperlukan dalam metode kuantitatif yang kemudian dipergunakan

untuk melihat pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji analisis regresi linear berganda:

Tabel 4.5 Analisis Regresi Berganda

Variabel	B	T	Sig
(Constant)	3,429	4.851	0,000
PAD	0,221	3.186	0,002
DAU	0,045	2.453	0,016
DAK	0,286	3.825	0,000
DBH	0,173	4.687	0,000
R = 0,724			
Adjusted R Square = 0,713			
n = 102			

Sumber: Output SPSS 2022

Variabel Dependen: LNBM

Keterangan:

BM : Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan dari hasil perhitungan dari Analisis Regresi Berganda, dirumuskan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,429 + 0,221X_1 + 0,045X_2 - 0,286X_3 - 0,173X_4$$

Rumusan model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,429. Menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai belanja modal adalah sebesar 3,429.
2. Koefisien regresi X_1 atau LNPAAD sejumlah 0,221. Mengindikasikan apabila variabel X_1 meningkat sejumlah satu, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,221.
3. Koefisien regresi X_2 atau LNDAU sejumlah 0,045. Mengindikasikan apabila variabel X_2 meningkat sejumlah satu, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,045.
4. Koefisien regresi X_3 atau LNDAK sejumlah 0,286. Mengindikasikan apabila variabel X_3 meningkat sejumlah satu, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,286.
5. Koefisien regresi X_4 atau LNDBH sejumlah 0,173. Mengindikasikan apabila variabel X_4 meningkat sejumlah satu, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,173.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk penilaian pada variabel independen terkait kapasitasnya dalam menjelaskan

variabel dependen pada suatu model regresi. Berdasarkan dari uji tersebut, hasil dari nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,713. Hasil tersebut disimpulkan bahwa variabel independen memiliki kapasitas dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 71,3% dan 38,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini.

4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini memakai nilai signifikansi dari uji statistik t. Tujuan dari uji statistik t adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tiap variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi level sebesar 0,05 atau ($\alpha=5\%$). Berikut adalah hasil dari uji hipotesis:

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan nilai signifikansi dari Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 0,002 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan nilai signifikansi dari Dana Alokasi Umum lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 0,016 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima sehingga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan nilai signifikansi dari Dana Alokasi Khusus lebih kecil dari 0,05 dengan nilai $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima sehingga variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan nilai signifikansi dari Dana Bagi Hasil lebih kecil dari 0,05 dengan nilai $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H4 diterima sehingga variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis 1 mengindikasikan bahwasanya variabel PAD memberikan pengaruh positif kepada Belanja Modal di Provinsi Se-Indonesia. Dengan ini berarti besar kecilnya nilai PAD maka akan memengaruhi Belanja Modal. Setiap pemerintah daerah selaku agen atau pihak yang menerima wewenang dituntut oleh pemerintah pusat selaku prinsipal atau pihak yang memberi wewenang untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan PAD di setiap daerahnya masing-masing dan digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur atau sarana prasarana daerah tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang dipunya dengan alokasi Belanja Modal dalam APBD. Makin

besar PAD yang diperoleh oleh daerah, maka akan makin longgar juga alokasi Belanja Modal nya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih and Haryanto (2019) yang menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja modal. Nopitasari (2017) juga berpendapat bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan Belanja Modal.

4.5.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Se-Indonesia. Hal ini berarti besar kecilnya DAU memengaruhi belanja modal.

DAU dapat menunjukkan seberapa tingkat kemandirian suatu daerah dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi suatu daerah untuk memenuhi belanja daerah tersebut. Dana alokasi umum dialokasikan dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah untuk membiayai daerah dengan tujuan desentralisasi. Pemerintah pusat selaku prinsipal memberi alokasi finansial dari pusat ke pemerintah daerah selaku agen termasuk dana alokasi umum yang diharapkan bisa meratakan finansial di setiap daerah. Pemerintah daerah yang memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga adanya

pengalokasian pembangunan publik di dalam dana APBN termasuk Belanja Modal dianggap perlu dilakukan.

Pada penelitian ini DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan dana transfer yang dilakukan pemerintah yaitu Dana Alokasi Umum adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena tujuan dialokasikan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi stabilitas keuangan daerah dan mengurangi kesenjangan dalam rangka desentralisasi.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudika and Budiarta (2017) dan Ardhani (2011) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmayanti (2018) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.5.3 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal di Provinsi Se-Indonesia. Hal ini berarti besar dan kecilnya DAK memengaruhi Belanja Modal.

Dana perimbangan termasuk DAK yang dialokasikan oleh pemerintah pusat selaku prinsipal diharapkan dapat membangun dan menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan

daerah seperti pembangunan infrastruktur termasuk mengalokasikan anggaran kepada sektor Belanja Modal. Pemerintah daerah selaku agen dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal dengan menggunakan dana perimbangan termasuk DAK.

DAK dianggap penting dalam dinamika membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana suatu daerah karena sesuai dengan tujuan DAK yaitu meringankan beban pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan khusus. Dalam pemanfaatan fungsinya DAK ditujukan kepada kegiatan pengadaan, peningkatan, investasi, pembangunan serta perbaikan sarana prasarana fisik yang memiliki umur ekonomis cenderung panjang. Dengan dialokasikannya DAK maka dapat berpengaruh terhadap belanja modal, sebab DAK condong meningkatkan aset tetap yang punya oleh pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik (Permatasari & Mildawati, 2016).

Hasil penelitian ini sama pada penelitian yang dibuat oleh Wandira (2013) dan Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa (2018) yang menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4.5.4 Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis ke-4 mengindikasikan hasil bahwasanya variabel DBH memberikan pengaruh positif kepada

Belanja Modal di Provinsi Se-Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai DBH maka memengaruhi Belanja Modal.

DBH yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat selaku prinsipal dianggap cukup potensial dan menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah selaku agen dalam mendapatkan dana pembangunan serta memenuhi belanja daerah yang bukan dari PAD selain DAU dan DAK. Dana perimbangan dari pusat kepada daerah menuntut tiap daerah dapat membangun serta menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah seperti pembangunan infrastruktur termasuk mengalokasikan anggaran ke sektor Belanja Modal. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti and Fahlevi (2016) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula Belanja Modalnya.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAU maka semakin besar pula Belanja Modalnya.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAK maka semakin besar pula Belanja Modalnya.
4. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DBH maka semakin besar pula Belanja Modalnya.

5.2 SARAN

1. Dengan adanya pengaruh pada DAK, dan DBH yang amat signifikan kepada Belanja Modal, sehingga diharapkan pemerintah dapat makin

menambah proporsi anggaran DAK, dan DBH dari dana perimbangan lainnya yang dialokasikan terhadap Belanja Modal.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain dari aspek keuangan seperti Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan lainnya, atau dengan menambahkan variabel lain aspek non keuangan seperti Pertumbuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 No. 2.
- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013- 2015.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah).
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bastian, I. (2002). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia*.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal. *KINERJA*, 14.
- Halim, A. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga).
- Halim, A. (2008). Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: "Akuntansi Keuangan Daerah".
- Halim, A., & Nasir. (2006). Akuntansi Keuangan Daerah. 44.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Belanja Modal.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengelokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2.
- Nopitasari, E. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.

- Rachmayanti, E. D. (2018). Studi Analisis Kestabilan Transien dengan Metode *Time Domain Simulation* pada Sistem Kelistrikan Kalimantan 275 kV.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali.
- Sukarna, F., Subekan, A., & Rengga, A. (2012). Evaluasi Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003.
- Sulistyaningsih, I., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1 No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan. Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Wahyuni, & Adi, P. H. (2009). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali).
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3.

LAMPIRAN 1

DATA PENELITIAN

DATA BELANJA MODAL

Provinsi	Belanja Modal		
	2017	2018	2019
Aceh	892015	632093	874371
Sumatera Utara	1088711	962608	960446
Sumatera Barat	512625	494833	523286
Riau	613399	460116	620205
Jambi	391399	367425	451378
Sumatera Selatan	764039	786877	1034829
Bengkulu	244644	202948	246732
Lampung	647451	616726	452849
Bangka Belitung	160690	159765	182160
Kep Riau	210539	227224	277780
Prov DKI Jakarta	1104572	1411861	1155193
Prov Jawa Barat	1852580	1784553	1963412
Prov Jawa Tengah	1607527	1553209	1551338
Prov DI Yogyakarta	270990	285272	306660
Prov Jawa Timur	2022443	1857238	2111993
Prov Banten	711491	692622	687190
Prov Bali	397413	314607	303886
Prov Nusa Tenggara Barat	462811	402146	409816
Prov Nusa Tenggara Timur	504032	480265	529296
Prov Kalimantan Barat	546627	481037	509194
Prov Kalimantan Tengah	458843	473498	484084
Prov Kalimantan Selatan	503399	453148	578996
Prov Kalimantan Timur	534267	753520	934415
Prov Kalimantan Utara	196451	165325	153801
Prov Sulawesi Utara	398621	340471	326838
Prov Sulawesi Tengah	379858	335772	427337
Prov Sulawesi Selatan	864431	783245	782408
Prov Sulawesi Tenggara	481040	452973	524162
Prov Gorontalo	127025	132566	133882
Prov Sulawesi Barat	197759	166616	183457

Prov Maluku	322399	319326	284229
Prov Maluku Utara	266675	258321	319409
Prov Papua	960832	1012962	983985
Prov Papua Barat	467673	529701	622366

DATA PAD

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah		
	2017	2018	2019
Aceh	495614	506092	554965
Sumatera Utara	1073200	1080005	1131241
Sumatera Barat	466316	427905	442644
Riau	629953	611234	617629
Jambi	285965	286883	294917
Sumatera Selatan	609248	626651	664569
Bengkulu	146427	159870	152782
Lampung	452476	460534	508619
Bangka Belitung	164327	168721	163494
Kep Riau	301388	321470	346748
Prov DKI Jakarta	4390149	4332714	4570740
Prov Jawa Barat	4140015	4024046	4415091
Prov Jawa Tengah	2694533	2676678	2864804
Prov DI Yogyakarta	434990	450318	474251
Prov Jawa Timur	3726312	3708632	3934467
Prov Banten	1471144	1467380	1576302
Prov Bali	1073730	1131996	1230557
Prov Nusa Tenggara Barat	399433	328678	359801
Prov Nusa Tenggara Timur	306224	250861	284407
Prov Kalimantan Barat	388872	403513	417991
Prov Kalimantan Tengah	274170	288450	321211
Prov Kalimantan Selatan	486070	546153	565004
Prov Kalimantan Timur	704834	813818	953763
Prov Kalimantan Utara	82683	91785	105717
Prov Sulawesi Utara	227776	228023	238036
Prov Sulawesi Tengah	242817	228447	247559
Prov Sulawesi Selatan	835495	816816	877401
Prov Sulawesi Tenggara	191432	178123	206334
Prov Gorontalo	101845	92667	104731

Prov Sulawesi Barat	80550	71891	77357
Prov Maluku	92692	101342	104521
Prov Maluku Utara	84599	84130	99026
Prov Papua	248075	238529	349650
Prov Papua Barat	99013	93741	109624

DATA DAU

Provinsi	Dana Alokasi Umum		
	2017	2018	2019
Aceh	2060263	2060263	2322266
Sumatera Utara	2629224	2629224	2713750
Sumatera Barat	2014646	2014646	2076398
Riau	1457997	1465117	1548578
Jambi	1397912	1399367	1433203
Sumatera Selatan	1697897	1697762	1743742
Bengkulu	1301538	1300978	1334178
Lampung	1851595	1854701	1906780
Bangka Belitung	980297	1018435	1046862
Kep Riau	1059822	1150516	1190057
Prov DKI Jakarta	0	0	0
Prov Jawa Barat	3011001	3023552	3212647
Prov Jawa Tengah	3652586	3652586	3784512
Prov DI Yogyakarta	1314372	1314262	1351102
Prov Jawa Timur	3803428	3813411	3998431
Prov Banten	1059320	1072903	1140003
Prov Bali	1260842	1268585	1325847
Prov Nusa Tenggara Barat	1537777	1537777	1583746
Prov Nusa Tenggara Timur	1784462	1827412	1827412
Prov Kalimantan Barat	1720698	1724402	1756069
Prov Kalimantan Tengah	1574382	1574382	1603623
Prov Kalimantan Selatan	1106532	1118213	1188146
Prov Kalimantan Timur	714906	767682	815693
Prov Kalimantan Utara	1185105	1185105	1209517
Prov Sulawesi Utara	1390272	1427544	1463436
Prov Sulawesi Tengah	1546247	1586163	1637588
Prov Sulawesi Selatan	2509480	2509480	2586312
Prov Sulawesi Tenggara	1563334	1575959	1614486

Prov Gorontalo	997598	1006924	1043126
Prov Sulawesi Barat	1008360	1025033	1064068
Prov Maluku	1555603	1670234	1699714
Prov Maluku Utara	1265846	1331236	1349662
Prov Papua	2338200	2571298	2616545
Prov Papua Barat	1411972	1431332	1456520

DATA DAK

Provinsi	Dana Alokasi Khusus		
	2017	2018	2019
Aceh	1489202	1483635	1744872
Sumatera Utara	3838053	3912060	4205592
Sumatera Barat	1699580	1784401	1844831
Riau	1607851	1641194	1913695
Jambi	934827	939049	1067008
Sumatera Selatan	855483	2171297	2259488
Bengkulu	635034	110698	148677
Lampung	542809	745585	581870
Bangka Belitung	438826	460227	491156
Kep Riau	569776	590028	645650
Prov DKI Jakarta	2121801	2645603	2796003
Prov Jawa Barat	9118920	9379906	10018939
Prov Jawa Tengah	6566890	267575	6974422
Prov DI Yogyakarta	967000	910032	978540
Prov Jawa Timur	7056095	6850189	7548345
Prov Banten	2230361	2254780	2489732
Prov Bali	1105556	1042840	1095683
Prov Nusa Tenggara Barat	1384626	1412965	434251
Prov Nusa Tenggara Timur	1771353	1788419	1788419
Prov Kalimantan Barat	1529205	1508354	1686329
Prov Kalimantan Tengah	641584	746927	961814
Prov Kalimantan Selatan	970490	935797	1111000
Prov Kalimantan Timur	1107407	1070867	1153401
Prov Kalimantan Utara	291494	338681	342324
Prov Sulawesi Utara	1008208	956923	1044216
Prov Sulawesi Tengah	976155	948918	1207098
Prov Sulawesi Selatan	2565500	2540292	2632211

Prov Sulawesi Tenggara	1040897	1164611	1209370
Prov Gorontalo	393157	369637	436242
Prov Sulawesi Barat	498440	451844	574825
Prov Maluku	733329	850028	843459
Prov Maluku Utara	215674	654320	780339
Prov Papua	1029337	918901	1198617
Prov Papua Barat	338947	444560	491563

DATA DBH

Provinsi	Dana Bagi Hasil		
	2017	2018	2019
Aceh	253412	191892	211948
Sumatera Utara	460856	513848	381304
Sumatera Barat	152435	131765	106118
Riau	1473538	1721610	1674430
Jambi	390520	406804	396541
Sumatera Selatan	1507730	1643957	1695468
Bengkulu	61311	66368	46257
Lampung	249339	216040	138544
Bangka Belitung	120836	215555	204414
Kep Riau	526669	537457	737446
Prov DKI Jakarta	16847488	15209572	11698389
Prov Jawa Barat	1851522	1804540	1483784
Prov Jawa Tengah	848309	769449	575967
Prov DI Yogyakarta	98483	93141	56059
Prov Jawa Timur	1174871	2170602	2392199
Prov Banten	640348	650604	536825
Prov Bali	169597	182554	126532
Prov Nusa Tenggara Barat	346520	261642	185324
Prov Nusa Tenggara Timur	87875	64494	12834
Prov Kalimantan Barat	170188	212226	177722
Prov Kalimantan Tengah	372437	582759	607965
Prov Kalimantan Selatan	635201	932678	845973
Prov Kalimantan Timur	1710694	2991230	3207168
Prov Kalimantan Utara	201013	301523	401446
Prov Sulawesi Utara	109560	120758	98116
Prov Sulawesi Tengah	124837	196347	149611

Prov Sulawesi Selatan	279526	237745	169796
Prov Sulawesi Tenggara	71365	124542	123841
Prov Gorontalo	26007	21619	15784
Prov Sulawesi Barat	25565	18969	13151
Prov Maluku	81395	79175	79371
Prov Maluku Utara	61349	115222	84231
Prov Papua	413011	924040	707242
Prov Papua Barat	1563004	965763	4959430



LAMPIRAN 2

HASIL OLAH DATA

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	102	11.183	15.335	12.94373	1.115596
DAU	102	.000	15.201	13.86682	2.453992
DAK	102	11.615	16.120	13.94481	.884751
DBH	102	8.966	16.640	12.62232	1.479172
BELANJA MODAL	102	10.105	14.563	13.08541	.740096
Valid N (listwise)	102				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^a	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.38876282
Most Extreme Differences	Absolute	0.093
	Positive	0.088
	Negative	-0.093
Kolmogorov-Smirnov Z		0.938
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.342

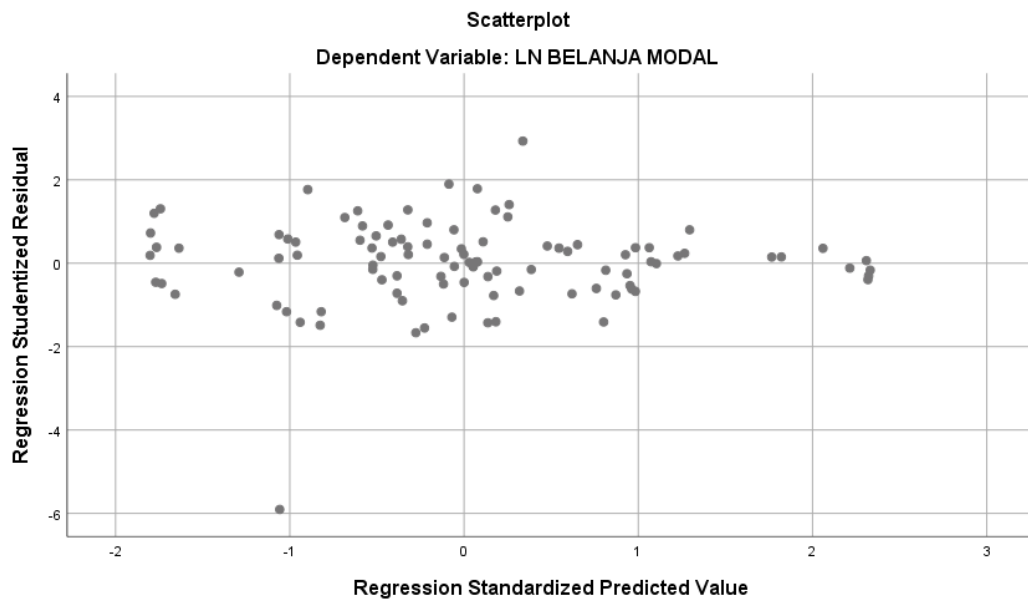
3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.429	.707		4.851	.000		
PAD	.221	.069	.333	3.186	.002	.261	3.829
DAU	.045	.018	.148	2.453	.016	.776	1.288
DAK	.286	.075	.342	3.825	.000	.355	2.814
DBH	.173	.037	.347	4.687	.000	.520	1.922

a. Dependent Variable: LN
BELANJA MODAL

4. Uji Heteroskedastisitas



5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.713	.396698	1.900

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.429	.707		4.851	.000		
PAD	.221	.069	.333	3.186	.002	.261	3.829
DAU	.045	.018	.148	2.453	.016	.776	1.288
DAK	.286	.075	.342	3.825	.000	.355	2.814
DBH	.173	.037	.347	4.687	.000	.520	1.922

a. Dependent Variabel: LN
BELANJA MODAL

